



PEMERINTAH KABUPATEN PASER INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav 2
Tana Paser Kode Pos 76251 Email: inspektorat.paser@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR: 100.3.4.4/KEP-14/ITDAKAB/II/2026

TENTANG

RENCANA AKSI (RA) KINERJA TAHUN 2026

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun Rencana Aksi kinerja sasaran Perangkat Daerah. Rencana Aksi atau action plan adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah {Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG RENCANA AKSI (RA) KINERJA TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Inspektor Daerah Kabupaten Paser ini;
- KEDUA : Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU digunakan sebagai landasan dan Acuan dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Lampiran Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan Inspektor Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 26 Januari 2026



Inspektur,

Hj. Dharni Haryati, SE.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002

**FORM
RENCANA AKSI KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tujuan	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.010	3.010	3.010	3.010							24,574,806,096
Sasaran 1	Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	93,65	93,65	93,65	93,65							2,878,242,900
	Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Pengawasan Pemerintah dan Desa yang Ditindaklanjuti	10	20	30	50	2,878,242,900
						Persentase Rekomendasi Pengawasan Kinerja yang Ditindaklanjuti		15	30	45	70		
						Persentase Rekomendasi Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti		15	30	45	70		
						Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan PDDT yang Ditindaklanjuti		20	45	65	90		
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan pemerintah dan desa	25	50	75	100	2,365,410,900	
					Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan kinerja		25	50	75	100			
					Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan keuangan pemerintah daerah		25	50	75	100			
					Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian Dokumen sesuai dengan Peraturan, Kebijakan, Prosedur yang Berlaku pada Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		25	50	75	100			

							Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Jumlah Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	6	3	555,270,000
							Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Jumlah Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5	48	24	17	458,612,000
							Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	1	0	0	129,714,000
							Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	0	0	0	163,492,000
							Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	7	0	11	22	295,882,900
							Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	0	0	0	229,264,000
							Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	0	1	0	1	533,176,000
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	25	50	75	100	512,832,000
							Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0	0	1	0	78,936,000
							Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	0	0	1	0	433,896,000

							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Sesuai Ketentuan Berlaku	25	50	75	100	1,098,770,700
								Rata-rata Nilai Sakip Perangkat Daerah	69	69	69	69	
								Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	90.5	90.5	90.5	90.5	
								Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Zona Integritas	25	25	25	25	
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Diimplementasikan	25	50	75	100	34,010,000
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1	0	0	0	34,010,000
							Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko	25	35	45	60	1,064,760,700
								Tingkat Keseuaian rencana aksi RB sesuai dengan roadmap dan regulasi	25	35	45	60	
								Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	25	50	75	100	
								Persentase peningkatan pemenuhan dokumen MCP KPK yang sesuai indikator Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Pembangunan ZI	35	50	70	91	
							Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	0	0	0	195,570,000
							Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0	41	0	0	443,632,000
							Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	0	1	1	210,042,700

							Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	0	0	6	215,516,000
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Urusan Pemerintahan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	76	76	76	76							20,597,792,496
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	75,5	75,5	75,5	75,5							
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Manajemen Internal	76	76	76	76	20,597,792,496
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	25	50	75	100	165,034,000
						Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25	50	75	100		
						Persentase Konsistensi Renja Dengan Renstra Tahun Berkenaan		25	50	75	100		
						Persentase Keselarasan Muatan Renstra Dengan RPJMD							
						Persentase Ketersediaan Data Kinerja		25	50	75	100		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1	1	1	52,332,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase RKA-SKPD Disusun Sesuai KAK	20	40	60	70	9,176,000	
							Persentase RKA Disusun Menggunakan SSH & ASB	10	20	35	50		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	1	0		
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Kegiatan Diakomodir Dalam DPA-SKPD	25	50	75	100	9,176,000	
							Persentase KAK Per Kegiatan Pada DPA	10	30	50	70		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	1	0		

							Laporan Midterm SAKIP Perangkat Daerah	0	0	1	0	38,148,000
							LAKIP Perangkat Daerah	0	0	0	1	
							Laporan PM SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah	0	0	0	1	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan MR Perangkat Daerah	1	1	1	1	
							Laporan Implementasi RB General Perangkat Daerah	0	1	0	0	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	
							Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	25	50	75	100	56,202,000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah	1	1	1	1	
							Laporan Evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	0	1	0	0	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	2	
							Persentase Temuan Ditindaklanjuti	25	50	75	100	17,763,707,679
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase LHP Nihil	25	50	75	100	
							Kesesuaian data dan informasi kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	100	100	100	100	17,582,877,679
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	74	74	74	
							Persentase Dokumen SPJ Yang Dikembalikan	20	20	20	20	118,560,000
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123	109	80	238	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	1	54,870,000

							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	25	50	75	100	7,400,000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	4	6	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	25	50	75	100	81,264,000
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	0	1	14,634,000
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	33,708,000
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	3	0	3	32,922,000
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian IKI Dengan Nilai \geq 80	25	50	75	100	1,760,881,000
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	1	67,356,000
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	1	1	25,897,000
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	25	50	75	100	1,667,628,000
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53	3	5	13	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran	25	50	75	100	700,584,161
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	1	0	42,846,424
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	1	0	326,908,891
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	1	0	33,553,146

						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	3,600,000
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	3	3	3	8,880,000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	3	251,873,700
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	3	3	3	32,922,000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan BMD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	25	50	75	100	21,719,100
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	2	3	2	18,770,300
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	0	0	2,948,800
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi "Baik"	25	50	75	100	104,602,556
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Pakai	25	50	75	100	92,357,896
							Jumlah Kendaraan Dinas Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	2	2	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan Kantor Kondisi Baik	25	50	75	100	12,244,660
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	2	4	

						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	3,600,000
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	3	3	3	8,880,000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	3	251,873,700
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	3	3	3	32,922,000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan BMD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	25	50	75	100	21,719,100
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	2	3	2	18,770,300
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	0	0	2,948,800
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi "Baik"	25	50	75	100	104,602,556
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Pakai	25	50	75	100	92,357,896
							Jumlah Kendaraan Dinas Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	2	2	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan Kantor Kondisi Baik	25	50	75	100	12,244,660
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	2	4	

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 26 Januari 2026
Inspektur Daerah,



Hj. Dharni Haryati, SE.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002